BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 6 Tahun 2023 tentang pengumpulan zakat profesi melalui BAZNAS di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan belum berjalan secara optimal. Secara normatif, substansi surat edaran tersebut telah menunjukkan semangat integrasi antara struktur kelembagaan negara dengan lembaga zakat, namun secara empiris masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapannya. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman ASN terhadap substansi regulasi, belum tersosialisasikannya prosedur pemotongan zakat secara otomatis, dan tidak adanya penguatan dalam regulasi teknis daerah yang dapat menjembatani pelaksanaan di tingkat unit kerja.

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa sebagian besar ASN memiliki penghasilan bruto melebihi nisab (Rp7.000.000/bulan), dan secara fiqhiyyah memenuhi syarat wajib zakat profesi. Namun dari sisi penghasilan netto, banyak ASN yang belum memahami bagaimana penghitungan dilakukan. Di sisi lain, ada pula persepsi bahwa zakat lebih utama ditunaikan secara langsung kepada mustahik daripada melalui institusi. Selain itu, latar belakang ormas keagamaan, khususnya dominasi afiliasi Nahdlatul Ulama (NU), tidak secara otomatis menjamin ketaatan ASN dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS, karena memang secara fikih, dalam NU terjadi pro kontra tentang dukungannya terhadap zakat profesi.

Dengan pendekatan teori kolaborasi antar-lembaga Barbara Gray dan teori kepatuhan Herbert C. Kelman, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan zakat profesi sangat ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar-institusi, keberadaan forum komunikasi strategis, serta penguatan nilai-nilai spiritual di internal ASN. Ketiadaan harmoni regulasi antara pusat dan daerah, serta lemahnya struktur kelembagaan pendukung seperti UPZ, turut menghambat efektivitas pelaksanaan SE SEKMA tersebut.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung keberhasilan implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 tentang zakat profesi melalui BAZNAS di lingkungan Pengadilan Agama, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Pertama, diperlukan reformulasi regulasi teknis yang lebih operasional, baik melalui peraturan turunan dari Mahkamah Agung maupun nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan BAZNAS, guna memperjelas tata cara pemotongan, pelaporan, dan penyaluran zakat profesi secara struktural. Kedua, BAZNAS daerah bersama UPZ Pengadilan Agama harus lebih aktif dalam melaksanakan program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada ASN, agar pemahaman tentang zakat profesi, terutama perhitungan berbasis penghasilan netto, dapat dipahami dengan benar. Ketiga, penguatan kelembagaan UPZ perlu menjadi agenda prioritas, baik dalam aspek manajerial maupun legal, agar unit tersebut mampu melaksanakan fungsi edukatif dan administratif dengan baik. Keempat, penting dilakukan harmonisasi regulasi pusat dan daerah (peraturan turunan) yang mengatur tentang zakat profesi, seperti nisab zakat profesi, dan kapan zakat profesi harus ditunaikan, karena

disharmoni (belum adanya peraturan turunan dari instansi dibawah) saat ini menyebabkan kebingungan ASN dan berpotensi melemahkan kepatuhan. Terakhir, perlu dikembangkan pendekatan yang bersifat kultural dan spiritual untuk meningkatkan kesadaran ASN dalam berzakat, di antaranya dengan membangun narasi-narasi keagamaan yang kuat, pendekatan keormasan keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta mengedepankan nilai-nilai keikhlasan dan kebermanfaatan zakat.

Penulis mengharapkan bahwa SE SEKMA RI ini agar memiliki daya ikat bagi aparaturnya pengadilan agama di seluruh Indonesia, sebaiknya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rekomendasi ini tidak hanya bertujuan memperkuat implementasi kebijakan yang telah berjalan, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi kesadaran dan penguatan kolaborasi antar-lembaga dalam pengelolaan zakat secara profesional dan berkeadilan.